

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Pertumbuhan ekonomi

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Adam Smith dan David Ricardo)

Menurut Adam Smith (1723-1790) merupakan salah satu tokoh klasik yang mengagas mengenai teori ekonomi, termasuk teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Pertumbuhan Output Total terapat 3 (Tiga) unsur pokok dalam sistem produksi yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Alam yang menjadi batas maksimum dalam pertumbuhan ekonomi. Jika sumber daya alam yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka jumlah penduduk dan persediaan barang modal akan ikut berperan pada pertumbuhan output. Akan tetapi, jika semua sumber daya alam tersebut terpakai secara maksimum, maka pertumbuhan output akan terhentikan.

2. Jumlah Penduduk akan berproses dalam pertumbuhan output yang mana beradaptasi dengan kebutuhan Tenaga Kerja dalam suatu masyarakat.
3. Barang modal berpengaruh dalam faktor produksi yang sebagaimana penentu tingkat output dan berperan dalam pertumbuhan output. Dalam hal ini, persediaan barang modal berpengaruh terhadap Tenaga Kerja.

Adam Smith berpendapat bahwa tingkat upah yang tinggi dan meningkat apabila cepatnya pertumbuhan akan permintaan tenaga kerja daripada penawaran tenaga kerja. Namun persediaan barang modal dan tingkat output masyarakat sebagai penentu permintaan akan tenaga kerja. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan menurun dan berakibat mengurangi semangat para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal dan dalam jangka panjang, tingkat keuntungan akan menurun.

Dalam Gagasannya mengenai pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal yaitu *the law of diminishing return*, David Ricardo (1772-1823) mengemukakan tentang bagaimana penurunan suatu produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja. Menurutnya, dengan adanya kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup maka peningkatan produktivitas tenaga kerja akan tercapai. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi.

2.1.1.1 *New Growth Theory* (Pertumbuhan Ekonomi Baru)

Teori ini merupakan Teori pertumbuhan Baru yang berdasarkan pada Teori Endogen yang mana membeikan suatu kerangka teoritis untuk mengetahui pertumbuhan GNP sebagai akibat dari keseimbangan jangka panjang. Dasar dalam teori ini menjelaskan perbedaan dari tingkat pertumbuhan yang diteliti. Pada teori ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan endogen yang dianggap ditentukan secara eksogen oleh persamaan pertumbuhan. Dalam Teori Endogen dijelaskan bahwa adanya skala hasil yang meningkat atau disebut *Increasing Return to Scale* dan pola pertumbuhan jangka panjang antar Negara.

Teori pertumbuhan endogen merupakan suatu proses pertumbuhan GNP (Gross National Product) yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang. Model pertumbuhan endogen melihat perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari investasi dalam sumber daya manusia dan industri-industri padat teknologi baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam mengelola perekonomian nasional. Teori ini juga menganggap bahwa kemajuan bidang teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan dalam pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Akumulasi modal dianggap sebagai sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi. Modal atau capital memiliki arti secara luas bahwa dengan memasukan model ilmu pengetahuan dan model sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau endogen tapi teknologi dianggap sebagai proses dari pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut berperan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi dan tabungandapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mankiw,2008).

Menurut Rostow, dalam sebuah Economic journal yang kemudian dikembangkan kedalam buku “The Stages Of Economic Growth” mengemukakan bahwa proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap Negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya. Kelima tahap tersebut yaitu (Sadono, 1985) :

1. Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)
2. Prasyarat Untuk Lepas Landas (The Preconditions For Take-Off).
3. Lepas Landas (The Take-Off).
4. Gerakan Kearah Kedewasaan (The Drive To Maturity), Dan
5. Masa Konsumsi Tinggi (The Age Of High Mass Consumption).

Dengan demikian walaupun kapasitas dalam memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan

pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila pengeluaran masyarakat meningkat dibandingkan masa lalu. Berangkat dari hal itu bahwa analisis Harrod-Domar menunjukkan syarat yang diperlukan agar dalam jangka panjang kemampuan memproduksi bertambah dari masa ke masa yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya akan selalu sepenuhnya digunakan.

2.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Syari'ah

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalankahidupan manusia

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut adalah

:

- a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif.

Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

- b. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana

transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi harusmemprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

1. Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan daei segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.
3. Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional. Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya. Konsep harta dalam ekonomi islam, sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan investasi.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.1.2 Teori Ketimpangan

Ketimpangan adalah suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin negara sedang berkembang, maupun negara maju. Namun yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan telah merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada penggunaan tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Definisi Ketimpangan Pendapatan Menurut Robert E Baldwin (1986), kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini dapat terlihat dalam segi pendapatan. Masalah kesenjangan pendapatan juga sering diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Bruce Herrick/Charles P Kindeleberger, 1988 : 171).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari kesenjangan tersebut maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk. Menurut Mubyarto

(1995), kesenjangan dapat dibedakan menjadi ;

1. Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian. Kesenjangan jenis ini merupakan masalah lama dan sudah menjadi bahan kajian para pakar di banyak negara
2. Kesenjangan antar daerah. Dalam sejarah, kesenjangan antar daerah terjadi antar wilayah Jawa dan Luar Jawa, dan sejak kemajuan Provinsi Bali yang luar biasa, menjadi kesenjangan “Jawa dengan Luar Jawa Bali”
3. Kesenjangan antar golongan ekonomi. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis, perekonomian yang tumbuh terlalu cepat justru mengakibatkan kesenjangan menjadi semakin parah

Todaro dan Smith (2006), menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Ketimpangan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas
3. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap kurang adil.

Ketimpangan antar daerah disebabkan oleh mobilisasi sumber- sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Sumber daya tersebut antara lain akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki.

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Melihat fakta ini dapat dikatakan bahwa disparitas regional merupakan konsekuensi dari pembangunan itu sendiri (Syafrizal, 2008).

Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi hanya di suatu daerah tertentu secara langsung berdampak pada disparitas pendapatan daerah yang sangat bervariasi. Daerah yang satu mampu memberikan pendapatan yang tinggi, sebaliknya daerah yang lain memberikan pendapatan yang relatif rendah. Pada gilirannya, semua itu akan berimbas kembali pada kemampuan regional untuk berkembang. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antar daerah. Pembangunan ekonomi di daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan daerah yang memiliki tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Begitu pula, konsentrasi penduduk di dalam dan di sekitar kota-kota besar biasanya diikuti dengan adanya disparitas pendapatan antar daerah (Akita dan Lukman, 1995). Dalam usaha untuk menekan laju ketimpangan ini, maka harus ditentukan kebijakan yang tepat. Pemilihan kebijakan yang tepat akan menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan semua pelaku ekonomi dalam pembangunan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda-beda akan menyebabkan terjadinya ketimpangan disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah.

Dalam laporan Pembangunan Dunia tahun 2006, publikasi World Bank, dinyatakan bahwa ketimpangan (baik antar wilayah maupun antar negara) merupakan hal yang penting dalam pembangunan, karena ketimpangan mempengaruhi proses pembangunan jangka panjang. Dua saluran yang digunakan ketimpangan untuk mempengaruhi pembangunan dalam jangka panjang adalah melalui pengaruh- pengaruh kesempatan yang timpang ketika kondisi pasar tidak sempurna dan berbagai kosekuensi ketimpangan untuk kualitas institusi yang dikembangkan oleh suatu masyarakat.

Lebih lanjut, World Bank dalam laporannya tersebut menyatakan bahwa faktor- faktor geografis dan historis yang mendasari ketimpangan antar wilayah sangat kompleks dan tumpang tindih. Kemampuan mengelola sumber daya yang rendah dan jarak dari pasar yang jauh dapat menghambat proses pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan ekonomi itu disebabkan oleh relasi yang tidak setara dan sudah berlangsung lama, antara kawasan-kawasan yang maju dengan yang tertinggal, serta kelemahan institusional pada waktu sebelumnya.

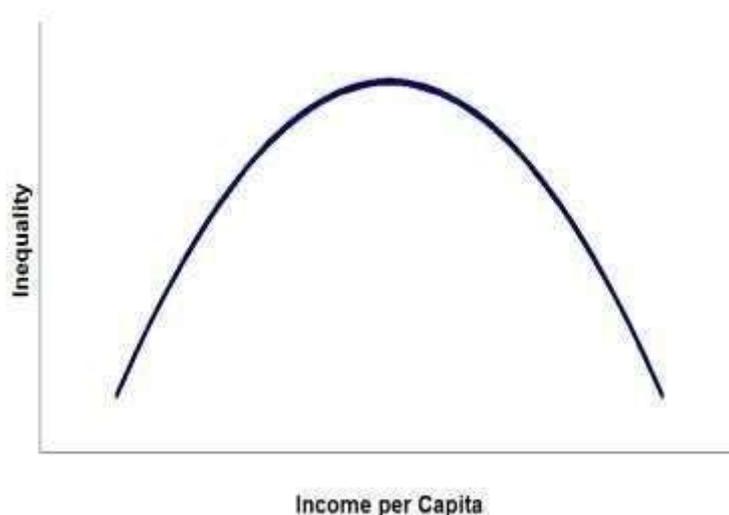
Myrdal dalam (Jhingan (2004) menerangkan ketimpangan antar daerah dengan membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, Myrdal menggunakan ide spread effect dan backwash effect sebagai bentuk pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran

kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Lebih lanjut, Myrdal mengemukakan ketimpangan regional terjadi akibat besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang

Kuznets dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesis yang terkenal dengan sebutan “Hipotesis U terbalik”. Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, terdapat trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja.

Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional. Akan tetapi dalam jangka panjang pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan (*maturity*) dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas serta mobilitas semua faktor-faktor produksi antar negara tanpasedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar negara akan cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat

pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan rata-rata yang semakin tinggi di setiap negara, yang akhirnya menghilangkan kesenjangan.



Gambar 2.1 Distribusi pendapatan nasional

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi yang dimaksud, diantaranya yaitu:

2.1.2.1 Gini Ratio dan Kurva Lorenz

Gini Rasio adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, besarnya koefisien gini tersebut menjelaskan derajat pemerataan/ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, semakin baik atau merata distribusinya. Sebaliknya, semakin besar koefisiennya (semakin mendekati satu) semakin semakin timpang distribusinya (Dumairy, 1999). Rasio gini dapat ditaksir secara visual dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal

terhadap luas area segitiga OBC.

Semakin melengkung kurva Lorenz, area dibagi akan semakin luas, rasiogini-nya semakin besar dan menyiratkan distribusi pendapatan yang timpang.

Rasio gini juga dapat dihitung secara matematis ,dengan rumus :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan :

Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

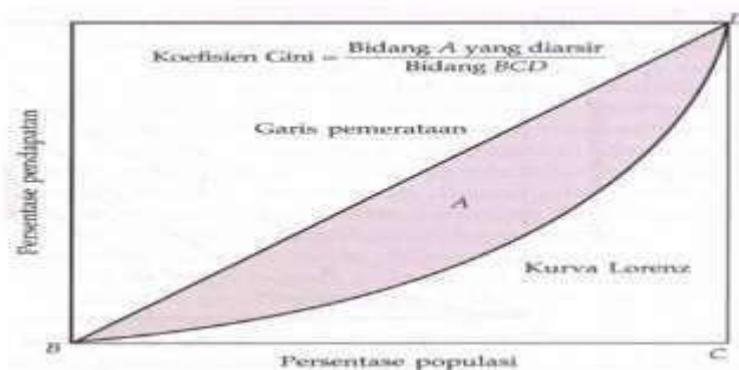
Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan atau ketidak merataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk termiskin menikmati 12 hingga 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka

ketimpangan atau kesenjangan dikatakan ringan (Dumairy, 1999).

Menurut BPS indikator yang sering digunakan untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia berdasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Ketimpangan distribusi pendapatan dikategorikan:

- (a). tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan;
- (b). sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan;
- (c). rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relative merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro, 2006).



Gambar 2.2 Kurva Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

2.1.2.2 Indeks Williamson

Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson, penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk wilayah.¹⁴ Berbeda halnya dengan indeks gini yang menghitung nilai distribusi pendapatan seluruh rumah tangga dalam suatu daerah atau negara, indeks Williamson ini dapat melihat besarnya ketimpangandistribusi pendapatan antar daerah dalam sebuah wilayah. Semakin besar angka indeks Williamson ini maka semakin besar pula tingkat ketimpanganyang terjadi. Indeks ini dapat dihitung dengan rumus:

Rumus Williamson

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(F_i - F)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW	= Indeks Williamson
Y _i	= PDRB/ kapita provinsi yang dihitung
Y	= PDRB / Kapita Rata-rata provinsi
f _i	= Jumlah penduduk di provinsi i
n	= jumlah penduduk Nasional

kategori ketimpangan dalam indeks ini terbagi menjadi 4, yaitu :

- 1) Nilai indeks > 1 :Terjadi Ketimpangan yang maksimum
- 2) Nilai indeks 0,7 -1 : terjadi ketimpangan yang tinggi.
- 3) Nilai indeks 0,4 – 0,6 : terjadi ketimpangan yang sedang.
- 4) Nilai indeks <0,3 : terjadi ketimpangan yang rendah.

2.1.2 Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan peundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud sebagai efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSN- MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip

Syariah di Bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Belakangan, instrumen keuangan syariah bertambah dengan adanya fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008, fatwa DSN-MUI Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Adapun instrumen-instrumen pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah (*sukuk*) dan reksadana syariah (Abdullah Amrin, 2011).

Perkembangan pasar modal syari'ah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator di antaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syari'ah yang mengeluarkan efek-efek syari'ah selain saham-saham dalam III. Karakter yang diperlukan dalam membantu struktur pasar modal syari'ah adalah sebagai berikut:

- a) Semua saham harus diperjualbelikan pada Bursa Efek
- b) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang
- c) Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi
- d) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.

Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria efek syariah, sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariah yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip pasar modal syariah adalah:

- a. Instrumen/efek yang diperjual-belikan harus sejalan dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), haram, riba dan batil.
- b. Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham atau pun *sukuk* harus mentaati semua peraturan syariah.
- c. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang (Yani Mulyaningsih, 2008).

2.1.2.1 Obligasi Syariah (Sukuk)

Kata sukuk berasal dari bahasa Arab *Shukuk* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Shakk* yang dalam peristilahan ekonomi berarti *legal instrument, deed, atau check*. Secara istilah sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Sementara ini sukuk disamakan dengan obligasi syari'ah. Menurut Fatwa DSN MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002 pengertian obligasi syariah (*sukuk*) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fees* serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dari pengertian

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa obligasi syariah (*sukuk*) merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan seperti akad *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *salam*, *istishna'* dan *ijarah* (sewa menyewa).

Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional tidak ada perbedaannya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan *return*. Dimana obligasi konvensional pendapatan atau *return* didapat dari bunga yang besarnya sudah ditetapkan/ditentukan di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syariah pendapatan didapat dari bagi hasil di masa yang akan datang.

Berdasarkan jenis akad yang dipakai, obligasi syaria'ah (*sukuk*) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

- a. *Sukuk Mudharabah*. *Sukuk mudharabah* adalah surat berharga yang berisi akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama dengan skema *profit sharing*, *trust investment* atau *trust financing* antara pemilik modal (*sahib al-mal*, *malikataurab al-mal*) dengan pengusaha (*Mudharib*, *'amil*) dimana pemilik modal menyerahkan

modalnya untuk dikelola oleh pengusaha. Pengelolaan bisnis sepenuhnya akan dilakukan oleh *mudharib* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dengan menerbitkan *sukuk mudharabah*, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari pengelolaan dana kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

- b. *Sukuk Murabahah*. Sukuk murabahah adalah surat berharga yang berisi akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan memberi tahu harga pembelian dan keuntungan yang ingin diperoleh dari penjualan barang tersebut. Dengan menerbitkan sukuk murabahah, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
- c. *Sukuk Musyarakah*. Sukuk musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama atau kemitraan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal atau kerja dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Berbeda dengan mudharabah dimana *sahib al-mal* tidak terlibat dalam pengelolaan usaha, pemodal dalam musyarakah ikut aktif dalam pengelolaan keuangan dan manajemen. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil pengelolaan dana milik pihak-pihak yang berakad kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

- d. *Sukuk Salam*. Sukuk salam adalah surat berharga yang berisi akad salam. Salam adalah pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran di depan namun penyerahan barang tersebut dilakukan di kemudian hari. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
- e. *Sukuk Istishna*. Sukuk istishna adalah surat berharga yang berisi akad istishna. Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dengan begitu, penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.
- f. *Sukuk Ijarah*. Sukuk ijarah adalah surat berharga yang berisi akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Penerbit wajib memberikan pendapatan berupa *fee* hasil penyewaan asset kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

Karakteristik	Obligasi Konvensional	Obligasi Syariah
Sifat kepemilikan	Surat utang	Investasi
Sumber pendapatan	Nilai utang	<i>Income</i>
Pembayaran pendapatan	Tetap	Variabel dan tetap
Risiko	Bebas risiko	Tidak bebas risiko
<i>Underlying asset</i>	Tidak ada	Ada
Penggunaan hasil	Bebas	Sesuai syariah
Investor	Konvensional	Islami, Konvensional
Harga	<i>Market Price</i>	<i>Market Price</i>
Penghasilan	Bunga/kupon, <i>Capital gain</i>	Imbalan, Bagi hasil, <i>Margin</i>
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, korporasi
Pihak terkait	Obligor/ <i>Issuer</i> , Investor	Obligor, SPV, Investor, <i>Trustee</i>

Sumber : Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah (www.dmo.or.id)

Tabel 2.1. Perbandingan Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah

2.1.2.2 Reksadana Syari'ah

Menurut Fatwa DSN MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik (*shahibul mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan pengguna investasi (Andri Soemitra, 2009). Pada tabel berikut ini menunjukkan perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional:

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperluas kajian penelitian ini maka selain dari kajian teori yang telah dijelaskan dilakukan juga review terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini terutama didasarkan atas kesamaan objek penelitian yakni terkait dengan :

NO	Nama Tahun dan Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Daniel Sitindaon (2013), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Demak	Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS)	Peningkatan pertumbuhan penduduk akan menghambat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak, sedangkan peningkatan jumlah tenaga kerja akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi kabupaten Demak.
2.	Silvira Afrijal dan	Vector Error	Variabel pasar modal
	Talbani Farlian	Correction Model	signifikan mempengaruhi
	(2017), Kontribusi	(VECM) atau	pertumbuhan ekonomi

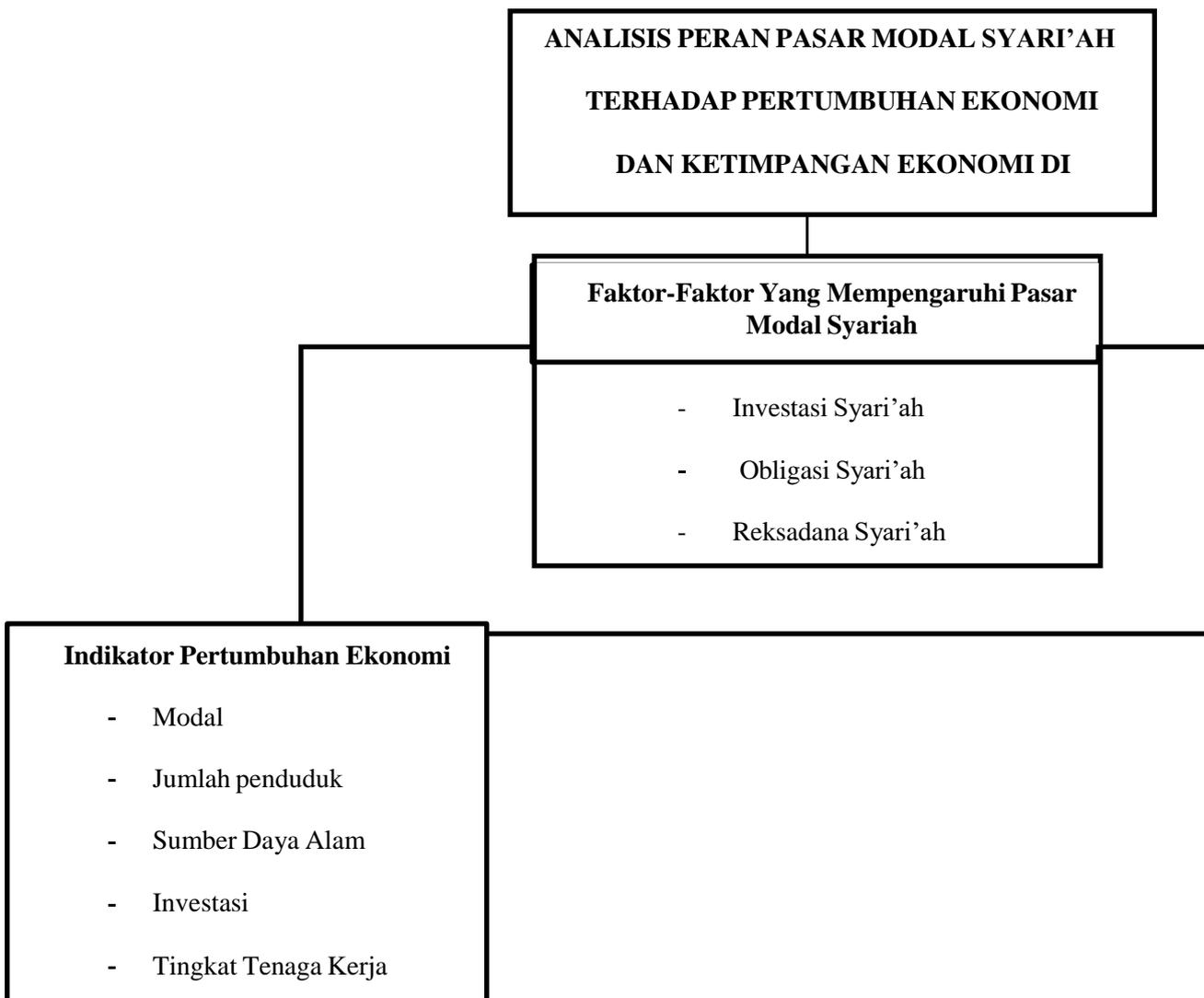
	Pasar Modal	VAR	non	Indonesia
	Terhadap Pertumbuhan	struktural		
	Ekonomi Indonesia			
3.	Khairina Tambunan	Menggunakan		Secara serempak menunjukkan sekitar 97,2% variabel reksadana konvensional, reksadana syari'ah, FASBIS dan ZIS mempengaruhi PDB Indonesia periode Januari 2013 – Desember 2015, Sedangkan 2,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
	(2016), Analisis	Metode		
	Pengaruh Investasi,	Analisis Regresi		
	Operasi Moneter,	Linear Berganda		
	dan ZIS Terhadap			
	Pertumbuhan Ekonomi			
	Indonesia			
4.	Yosie Gunawan (2012), Pengaruh Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia	Menggunakan metode Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM)		Nilai kapitalisasi pasar saham dan nilai tukar riil berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek. Variabel nilai kapitalisasi pasar saham, nilai saham yang diperdagangkan, dan nilai tukar riil berpengaruh secara signifikan dalam jangka panjang.

5.	Nurfaroh (2016), Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk dan Reksadana Syari'ah	Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda	Saham syari'ah dan reksadana syari'ah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
	Terhadap Pertumbuhan ekonomi Nasional periode 2008-2015		pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi sukuk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
6	Lutfhi safitri (2013)	Pengaruh EPS, PER, ROA, DER, dan MVA terhadap harga saham pada kelompok saham Jakarta Islamic Index (JII) periode 2008-2011	Simultan EPS, PER, ROA, DER dan MVA berpengaruh terhadap Harga Saham dalam Kelompok JII tahun 2008- 2011. Secara parsial EPS, PER, dan MVA berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham, sedangkan ROA dan DER tidak berpengaruh terhadap Harga Saham dalam Kelompok JII tahun 2008 - 2011

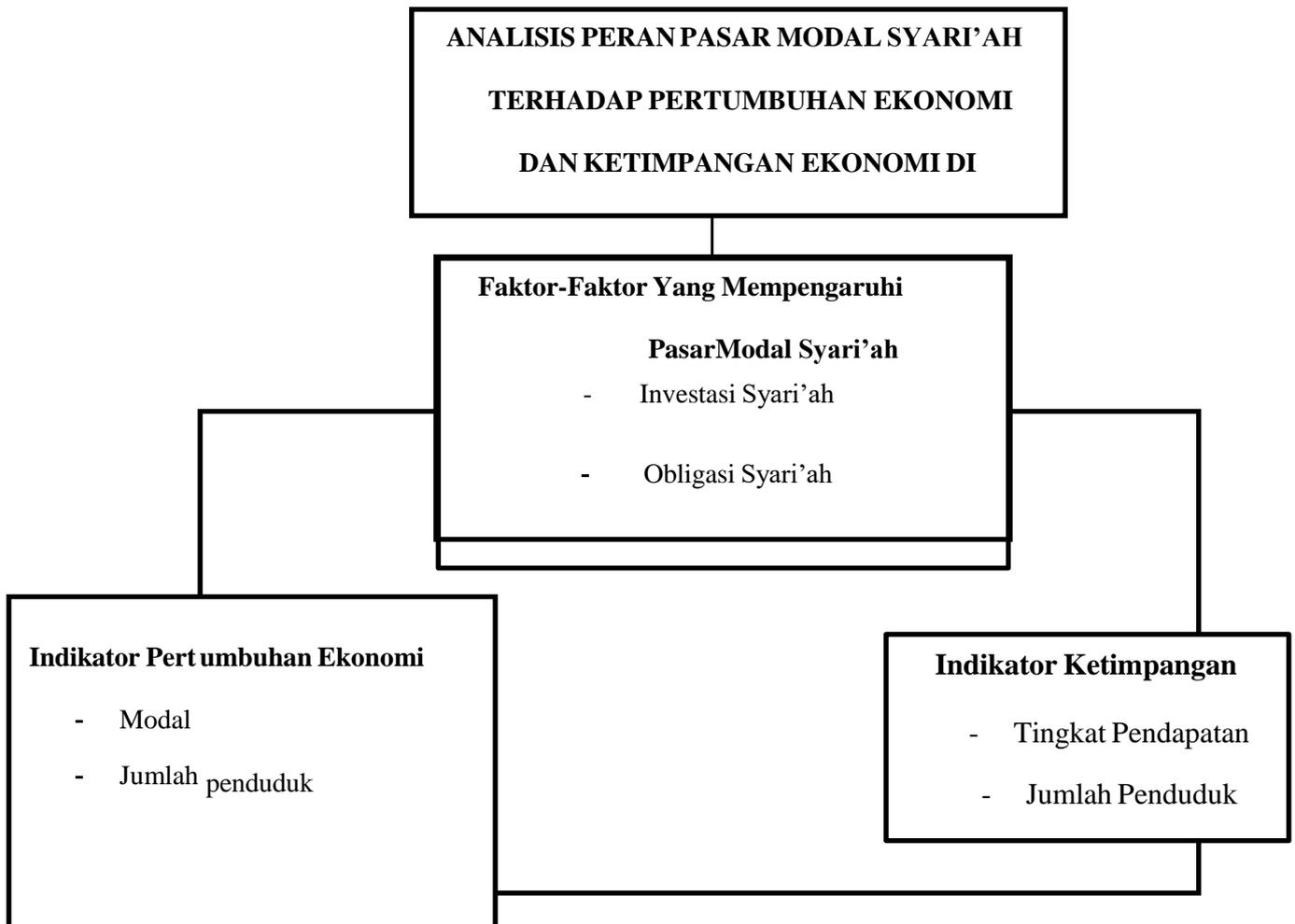
2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan pasar modal syari'ah yang semakin meningkat, mampu memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Melalui kebijakan dalam perekonomian yang tepat, maka hal tersebut dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk menganalisis peran pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada ketimpangan, maka diperlukannya kerangka untuk melihat variable-variabel yang mempengaruhinya juga sifat antar hubungannya.



Tabel 3.3.1 Kerangka Konseptual peran Pasar modal syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan



Gambar 3.3.2 Kerangka Pemikiran peran Pasar modal syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Adapun sub hipotesis dari penelitian ini adalah :

- a. Terdapat pengaruh variable *independent* Ketimpangan Ekonomi terhadap variabel *dependent* (Pertumbuhan Ekonomi) di Indonesia
- b. Terdapat pengaruh variable *independent* jumlah Penduduk terhadap variabel *dependent* (Pertumbuhan Ekonomi) diIndonesia
- c. Terdapat pengaruh variable *independent* Pasar Modal syari'ah terhadap variabel *dependent* (Pertumbuhan Ekonomi) diIndonesia.
- d. Terdapat pengaruh variable *independent* Investasi terhadap variabel *dependent* (Pertumbuhan Ekonomi) di Indonesia.